BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS

POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus dan Kasus Posisi

Globalisasi ekonomi mendorong Indonesia untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dari negara Indonesia. Tujuan Negara Republik Indonesia termuat di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UNDANG-UNDANG) 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ini punya makna bahwa: Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Keharusan adanya Undang-undang Dasar adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil

dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu salah satunya "*Memajukan Kesejahteraan Umum*". Adanya tujuan negara tersebut memberikan hak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang wajib dipenuhi oleh negaranya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa negara adalah wadah bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum tersebut dilaksanakan melalui pembangunan nasional. Pembangunan diwujudkan oleh Pemerintah dengan cara mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang kondusif guna mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di era globalisasi ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional memerlukan pembiayaan yang sangat besar, menuntut partisipasi aktif dari pelaku usaha dan masyarakat.

Dukungan terhadap pembangunan ekonomi nasional tersebut membutuhkan pengaturan mekanisme yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara ikut membangun badan usaha. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengambil kebijakan dengan membuka pengembangan badan usaha seluas luasnya baik berbentuk perseorangan maupun kerja sama, hal tersebut membuka peluang investasi bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

Terbukanya peluang investasi bagi masyarakat menghendaki adanya penyertaan modal yang besar. Aliran Modal terbentuk karena adanya transaksi jual dan beli aset-aset keuangan¹. Sedemikian pentingnya sehingga aliran modal dapat diibaratkan sebagai aliran darah yang mampu menghidupkan dan memperlancar investasi. Dari sisi makro, kelancaran aliran modal diyakini dapat memfasilitasi penanaman modal, memungkinkan terciptanya alokasi sumber daya kapital yang lebih baik, mendorong perkembangan sektor produksi dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan hukum ekonomi.

Sementara dari sisi mikro, tingginya aliran modal akan mendorong peningkatan efisiensi dari badan usaha. Semakin besar modal yang dimiliki oleh badan usaha akan semakin mendorong kinerja dari badan usaha itu sendiri. Kebutuhan akan modal tersebut seringkali tidak diimbangi dengan pelaku usaha yang memasukan modalnya ke badan usaha. Hal tersebut mengakibatkan adanya kekurangan modal bagi pelaku usaha dalam menjalankan produktivitas usahanya.

Kebutuhan badan usaha akan modal tersebut mendorong badan usaha untuk mencari sumber modal yang dapat dipercaya guna meningkatkan produktivitas badan usaha. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan modal adalah dengan mengajukan pinjaman kredit di bank. Kredit merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dimana peminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu².

¹ Astiyah, Siti dan Santoso, "*Nilai Tukar dan Trade Flows*", Bank Indonesia : WP/02/2005.

² *Ibid*

Pinjaman kredit yang diajukan oleh pelaku usaha kepada bank dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Dalam Pasal “1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau Undang-undang. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Perjanjian kredit yang dilakukan antara pelaku usaha dan bank tersebut seringkali merupakan transaksi yang bersifat derivatif yaitu menyesuaikan dengan ekonomi global dan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dewasa ini telah mengakibatkan nilai tukar rupiah menjadi sangat lemah. Hal tersebut sangat mempengaruhi nilai utang yang dimiliki oleh pelaku usaha berdasarkan perjanjian kreditnya dengan bank. Nilai utang menjadi bertambah dengan menguatnya harga dollar dan melemahnya nilai rupiah.

Krisis ekonomi inilah yang menyebabkan banyaknya badan usaha yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada pihak bank selaku pemberi kredit. Tidak mampunya pelaku usaha selaku debitor melunasi kewajibannya membayar utang kepada bank selaku kreditor mengakibatkan pihak kreditor mengajukan gugatan pailit ke pengadilan niaga. Kepailitan

berasal dari bahasa Perancis *Failite* yang berarti kemacetan membayar³. Di Indonesia kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana diubah ke dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG Kepailitan). Pasal 1 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Kepailitan pengertian kepailitan didefinisikan sebagai :

“sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Berdasarkan pengertian dari kepailitan tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidak mampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), terhadap suatu permohonan pailit ke pengadilan⁴.

Pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang terhadap debitor yang memenuhi persyaratan pailit seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Kepailitan yaitu :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

³ Rahayu Hartini. “Hukum Kepailitan”. Jakarta : UMM Press, 2007, hlm. 4

⁴ Ahmad Yani. “Seri Hukum Bisnis Kepailitan”. Jakarta : Rajawali Pers, 1999, hlm.100

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Kepailitan itu menyimpulkan bahwa permohonan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut⁵ :

1. “Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
3. Utang yang dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Yang dapat dinyatakan pailit adalah :
 - a Orang Perorangan;
 - b Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya;
 - c Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, dan yayasan berbadan hukum; dan
 - d Harta Peninggalan.”

Mengenai syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor, Pasal 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Kepailitan memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor, syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorium*. Rasio minimal adanya 2 (dua) kreditor tersebut adalah merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu

⁵ Bagus Irawan. “Aspek-Aspek Hukum Kepailitan”. Bandung : Alumni, 2007, hlm. 15

“Jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikannya hasil perolehannya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-undang”.

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitor harus mempunyai lebih dari seorang kreditor ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang :

“menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari pasu prorata parte*”.

Dalam hal ini bukan dipersyaratkan berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan. Disyaratkan bahwa debitor minimal mempunyai utang kepada dua orang kreditor⁶.

Agar tercapainya kepailitan, yaitu penyitaan atas harta debitor sebagai pelunasan utang-utangnya kepada kreditor, maka dalam UNDANG-UNDANG Kepailitan menentukan harus terpenuhinya asas pembuktian sederhana dalam pemeriksaan perkara kepailitan. Dalam Pasal 8 Ayat (4) UNDANG-UNDANG Kepailitan menentukan :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi”

Dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UNDANG-UNDANG Kepailitan dijelaskan bahwa :

⁶ Rachmadi Usman. “Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2004, hlm. 14-15

“yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan-putusan pernyataan pailit”

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UNDANG-UNDANG Kepailitan maka dapat disimpulkan bahwa asas pembuktian sederhana dalam kepailitan adalah pembuktian sederhana dalam memeriksa pembuktian terhadap permohonan perkara kepailitan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut debitor yang akan dipailitkan harus terbukti secara sederhana bahwa debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Terpenuhinya syarat dalam Pasal 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Kepailitan semestinya telah dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus pailit kepada debitor. Namun dalam pelaksanaannya adanya asas pembuktian sederhana ini tidaklah sesederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan UNDANG-UNDANG Kepailitan. Faktanya penerapan asas pembuktian sederhana di Pengadilan Niaga sering terjadi adanya penafsiran yang berbeda-beda atau inkonsistensi hakim Pengadilan Niaga tentang ketidakjelasan penerapan dari asas pembuktian sederhana tersebut⁷.

Salah satu kasus nyata yang terjadi di Indonesia yaitu Hubungan hukum antara kedua kreditor dan debitor tersebut berawal dari PT ESA KERTAS NUSANTARA yang meminjam dana kepada PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, diawali pada tanggal 17 april 2008 PT

⁷ Victorianus M.H Randa Puang. “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit”. Bandung : PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011, hlm. 65

ESA KERTAS NUSANTARA mengajukan pinjaman sebesar US \$ 25.000.000,- (dua puluh lima juta US dollar) sampai dengan jangka waktu 17 april 2009, tetapi seberjalannya waktu pada tanggal 2 Januari 2009 PT ESA KERTAS NUSANTARA telah menunggak pembayaran yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk membayar hal tersebut bukan hanya hutang pokok yang harus di bayar melainkan bunga dan juga denda, selain itu ternyata PT ESA KERTAS NUSANTARA memiliki utang juga kepada PT BANK MANDIRI Tbk dan juga kepada PT CIMB NIAGA Tbk.

Dalam kasus tersebut maka PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi permohonan pailit tersebut ditolak, dengan demikian bahwa seharusnya dalam asas pembuktian sederhana telah terpenuhi, terkait dengan penerapan asas pembuktian sederhana yang tidak konsisten dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Kepailitan adalah permohonan pailit yang diajukan oleh PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut BDI) kepada debitornya PT ESA KERTAS NUSANTARA (selanjutnya disebut EKN). Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 158 PK/ Pdt.Sus/2010 berpendapat bahwa walaupun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit telah terpenuhi, tetapi pembuktian akan selisih utang menjadi tidak sederhana lagi, sehingga permohonan Peninjauan Kembali oleh BDI harus ditolak.

Alasan sebagaimana pembuktian sederhana ditolak walaupun sudah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan karena, Fakta atau Keadaan sederhana, tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud.

Dalam kasus tersebut PT Esa Kertas Nusantara memiliki utang dalam jumlah US Dollar (\$), maka dari itu untuk melakukan pembuktian sederhana walaupun sudah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, tidak sesederhana itu karena mata uang US Dollar yang kursnya tidak menentu bisa naik dan turun sewaktu-waktu. Dalam putusan Peninjauan Kembali point nomor 13 mengatakan bahwa sangat patut dipertanyakan bagaimana mungkin majelis hakim tingkat kasasi yang seharusnya bertindak hati-hati dalam memeriksa, memahami, mengkaji dan memutuskan suatu perkara dengan begitu saja menyatakan bahwa pemberian fasilitas L/C maupun fasilitas *Trade Loan* adalah satu kesatuan dengan utang yang timbul dari transaksi Derivatif padahal permohonan pailit ini sama sekali tidak melibatkan tagihan dari transaksi derivatif.

Berdasarkan uraian di atas, melalui studi kasus ini penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk KEPADA DEBITORNYA PT ESA KERTAS NUSANTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEMBALI PEMBAYARAN UTANG”**

B. Kasus Posisi

Kasus permohonan pailit yang diajukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BDI) kepada debitornya PT Esa Kertas Nusantara (selanjutnya disebut EKN) diawali dengan pemberian kredit oleh

BDI kepada EKN. Kredit yang diberikan oleh BDI kepada EKN dalam mata uang US Dollar (\$) dengan jumlah kredit US \$ 25.000.000,- (dua puluh lima juta US Dollar), dalam jangka waktu 17 April 2008 sampai dengan 17 April 2009.

Sejak tanggal 2 Januari 2009 EKN telah menunggak membayar cicilan dan telah jatuh tempo, hal tersebut tidak terbatas pada pembayaran pokok utang melainkan termasuk bunga dan denda. Bahwa EKN selain mempunyai kewajiban/utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, ternyata EKN juga memiliki utang/kewajiban kreditor lainnya, yaitu :

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah Rp 97.501.600.000,- (Sembilan puluh tujuh miliar lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) yang timbul dari pemberian Fasilitas *Letter of Credit Impor* dan Domestik, antara Bank tersebut dengan EKN, dimana kewajiban terhadap pembayaran bunga terhadap Bank Mandiri tersebut dilakukan upaya lindung nilai (hedging) dengan melakukan transaksi derivative Cross Currency Swap antara BDI dengan EKN;
2. PT Bank CIMB Niaga sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan juga Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang timbul dari perjanjian fasilitas kredit modal kerja, pinjaman investasi, negosiasi wessel ekspor dan dari fasilitas LC import dan atau dalam negeri;
3. Pemegang Saham EKN yaitu :
 - a Ali Alimsyah, beralamat di Jalan Elang Laut VII Nomor 34 RT.04/RW.03 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara;

- b Soenarjo Sampoerna beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 91 RT.05/RW.10 Manyar Sabarangan Mulyorejo Surabaya;
- c Iswanto Browo, Jalan Peta Selatan Nomor 88 B RT.07/RW. 011 Kalideres Jakarta Barat;
- Sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus miliar rupiah) dimana terhadap hak tagih dari seluruh piutan pemegang saham tersebut disepakati dengan BDI untuk disubordinasikan terhadap seluruh utang EKN kepada BDI berdasarkan Perjanjian Subordinasi Akta No.14 tertanggal 19 November 2007.
4. PT Cellmark Interindo Trade, beralamat di Jalan Jatiwaringin Raya No. 54, Pondok Gede, Jakarta Timur;
 5. PT Hidup Bahagia Sentosa, beralamat di Jalan Ciwalengke No. 101 Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
 6. PT Omya Indonesia, beralamat di Jalan Raya Km. 20 (Surabaya-Mojokerto), Desa Tanjung, Trosobo, 61257;
 7. PT Hopax Indonesia, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok V No. 5, Mojokerto, Jawa Timur;
 8. PT Tangguh Karimata Jaya, beralamat di Jalan Raya Cakung, Cilincing No. 27A, Jakarta 14130;

Berdasarkan fakta di atas maka telah terbukti secara sederhana bahwa EKN memiliki paling tidak dua atau lebih kreditur dan disamping itu EKN juga tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Kepailitan yang menyebutkan :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Dapat disimpulkan bahwa EKN telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit. Namun hakim menganggap bahwa pembuktian utang menjadi tidak sederhana karena berhubungan dengan transaksi derivatif yang berhubungan dengan nilai tukar US Dollar, yang menyebabkan hakim pengadilan niaga menolak permohonan pailit dari BDI dalam Putusan Nomor 28/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Merasa tidak puas dengan Putusan Hakim Pengadilan Niaga, BDI kembali mengajukan upaya hukum kasasi terhadap EKN, akan tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan pailit BDI, karena menganggap bahwa Hakim Pengadilan Niaga tidak salah dalam menetapkan putusan hukum nya sehingga permohonan kasasi harus ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 708 K/Pdt.Sus/2009.

BDI yang menganggap Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melakukan kekeliruan yang nyata, sehingga BDI tetap teguh mempertahankan pendapatnya bahwa sebenarnya piutangnya memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UNDANG-UNDANG Kepailitan yang menyebutkan:

“yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan-putusan pernyataan pailit”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka BDI yakin bahwa EKN dapat dijatuhkan hukuman pailit

BDI mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 158 PK/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung berpendapat walaupun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit telah terpenuhi, akan tetapi pembuktian selisih utang akan menjadi tidak sederhana lagi sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak.

C. Masalah Hukum

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan asas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit PT Bank Danamon Indonesia kepada PT Esa Kertas Nusantara telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia kepada debitornya PT Esa Kertas Nusantara dengan ditolaknya permohonan pailit di Pengadilan Niaga?
3. Apakah tidak ada upaya hukum lain sebelum melakukan permohonan pailit?

D. Tinjauan Teoritik

Indonesia adalah negara hukum, diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UNDANG-UNDANGD 1945. "Negara hukum" dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan

serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan⁸. Di negara hukum tidak ada warga negara yang berada diatas hukum, dan karenanya semua warga negara harus patuh pada hukum⁹. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu asas negara hukum dalam tradisi *Eropa Continental* yang lazim menggunakan istilah *Rechtsstaat*, yang kemudian diakui sebagai nilai-nilai yang universal. Pandangan tentang negara hukum menurut *Immanuel Kant* adalah :¹⁰

“Negara itu adalah suatu keharusan adanya, karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam hukum. Artinya negara harus menjamin setiap warga negara bebas di dalam lingkungan hukum. Jadi bebas bukanlah berarti dapat berbuat semau-maunya, atau sewenang-wenang. Tetapi segala perbuatannya itu meskipun bebas harus sesuai dengan, atau menurut apa yang telah diatur dalam Undang-undang, namun tetap menurut kemauan rakyat, karena Undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kemauan umum”.

Berdasarkan prinsip negara hukum tersebut dapat dikatakan bahwa nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrument tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum merupakan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah

⁸ Sekretaris Jendral MPR RI. “Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)”. Jakarta : MPR RI, 2010, hlm.46

⁹ *Ibid* hlm. 47

¹⁰ A. Muhammad Asrun. “Krisis Peradilan Mahkamah Agung dibawah Soeharto”. Jakarta : ELSAM, 2004, hlm.42

negara hukum yang demokratis¹¹.

Salah satu ciri-ciri dari negara hukum adalah adanya ketentuan peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar bagi tindakan masyarakatnya. Ketentuan peraturan perUndang-undangan dibuat untuk seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang diatur oleh hukum adalah kepailitan. Peraturan perUndang-undangan yang mengatur tentang kepailitan adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG Kepailitan). Dengan adanya UNDANG-UNDANG Kepailitan dapat melindungi melindungi aspek bisnis dari perusahaan yang memberikan kredit kepada debitornya. Pasal 1 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Kepailitan pengertian kepailitan didefinisikan sebagai :

“sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Berdasarkan pengertian dari kepailitan tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), terhadap suatu permohonan pailit ke pengadilan¹².

Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang kepailitan tersebut

¹¹ Arbi Sanit. “Perwakilan Politik di Indonesia”. Jakarta : Rajawali,1985,hlm.25

¹² Ahmad Yani. “Seri Hukum Bisnis Kepailitan”. Jakarta : Rajawali Pers, 1999, hlm.100

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan hukum. Terbentuknya suatu sistem hukum yang baik diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum. R. Soebekti mengemukakan bahwa:

“tujuan hukum adalah hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban”.

Keadilan sebagai tujuan hukum dapat dipandang dari teori keadilan yang diungkapkan oleh *Aristoteles* bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kreditor dalam memberikan kredit kepada debitornya bertujuan untuk menambah modal debitornya sekaligus mencari keuntungan dari pemberian kreditnya. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian yang mengikat para pihak untuk menaatinya. Pada kenyataannya seringkali debitor gagal dalam membayar utangnya kepada debitornya sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kreditor. Dalam hal terjadinya kerugian ini, maka diperlukan suatu keadilan bagi kreditor yang telah memberikan kredit bagi debitornya yang ternyata tidak mendapat pelunasan hingga jatuh tempo.

Keadilan bagi kreditor diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, yang mana gugatan tersebut dimaksudkan untuk mempailitkan debitor yang gagal membayar utangnya. Adapun upaya mempailitkan tersebut dilakukan agar kurator menghitung seluruh aset yang tersisa dari debitor sehingga nantinya dapat digunakan untuk membayar utang kreditor.

Upaya mempailitkan debitor sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam suatu sistem hukum yang sangat bergantung pada penegakan

hukum itu sendiri karena hukum dikatakan sebagai sebagai alat kontrol sosial. *Roscoe Pound* mengatakan bahwa "*law as a tool of social engeneering*" yang artinya bahwa hukum adalah alat perubahan sosial. Hukum sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. Dengan demikian, hukum sebagai sarana kontrol sosial untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum diwujudkan dengan adanya penegakan hukum.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah :

"Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan".

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja¹³.

Penegakan hukum kepailitan sangatlah diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi kreditor yang memberikan kredit bagi debitornya. Adapun penegakan hukum yang dilakukan dalam upaya kepailitan adalah melalui pembuktian sederhana. Agar tercapainya kepailitan, yaitu penyitaan atas harta debitor sebagai pelunasan utang-utangnya kepada kreditor, maka dalam UNDANG-UNDANG Kepailitan menentukan harus terpenuhinya asas pembuktian sederhana dalam pemeriksaan perkara kepailitan. Dalam Pasal 8 Ayat (4) UNDANG-UNDANG Kepailitan menentukan :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi”

Berdasarkan fakta tersebut maka dibutuhkan suatu konsistensi terhadap penegakan asas pembuktian sederhana untuk melindungi kepentingan kreditor dalam upaya kepailitan yang diajukannya dan sebagai bentuk penegakan terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Kepailitan.

¹³ John Rawls. “A Theory of Justice, Massachusetts : The Belknap press of Harvard University Press Cambridge”. England, 1971, hlm. 235